

Implementasi Strategi dan Kebijakan Pendidikan Islam

Sri Wahyuni, M. Shahid Anggi E.R., Iwan Aprianto, Jamrizal

Yayasan Pendidikan Islam Universitas Islam Batanghari

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 13, 2025

Available online May 13, 2025

Keywords:

Strategy, Policy, Islamic Education

Kata Kunci:

Strategi, Kebijakan, Pendidikan Islam



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Tulisan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi aktual pendidikan Islam di Indonesia, strategi implementasinya, kebijakan yang mendasarinya, serta tantangan dan solusi ke depan. Harapannya, makalah ini dapat menjadi kontribusi dalam upaya kolektif meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Islam di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman yang terus berubah. Penelitian ini adalah studi normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber data utama dari data kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Implementasi strategi dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan usaha strategis dalam menciptakan generasi muslim yang berkualitas. Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, memainkan peran penting dalam merumuskan arah dan strategi pengembangan pendidikan Islam agar tetap relevan, adaptif, dan berkualitas.

ABSTRACT

This study aims to examine strategies for combating the potential for corruption through the implementation of anti-corruption education within educational institutions, including both schools and universities. The research adopts a qualitative approach, with data obtained from various sources such as books, academic journals, scholarly articles, and other relevant literature. The primary objective of this study is to reinforce and internalize anti-corruption values among the younger generation, particularly within formal educational settings. This initiative is driven by the persistent prevalence of corruption in Indonesia, which remains a significant national issue. Several contributing factors to corrupt behavior have been identified, including individual moral failings, familial and societal influences, economic and political conditions, and organizational weaknesses. Anti-corruption education is recognized as an effective preventive measure, which should begin by instilling ethical values and integrity from an early stage. This is especially crucial for university students, who are regarded as future leaders and bear the responsibility of upholding national development and governance standards.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan akhlak, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pendidikan Islam secara sejarahnya telah memainkan peran utama dalam membentuk karakter umat dan mengembangkan kebudayaan Islam, sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga kejayaan peradaban Islam di era klasik.

Di Indonesia, pendidikan Islam memiliki akar sejarah yang sangat kuat, dimulai dari sistem pendidikan tradisional seperti pesantren, kemudian berkembang melalui madrasah dan institusi pendidikan tinggi Islam. Pendidikan Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapannya di masyarakat. Pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan manusia yang menyeluruh. Pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya dalam pelajaran agama itu sendiri, agar peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.¹ Pendidikan Islam bukan hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan pelaksanaannya.²

¹ Shamsudin, Datuk Sheikh. (2023). "Integrasi Nilai Agama dalam Pendidikan."

² Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun demikian, implementasi strategi dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari segi strategi, banyak lembaga pendidikan Islam masih mengalami kesulitan dalam merancang dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Strategi pendidikan yang seharusnya mampu memadukan nilai-nilai spiritual, intelektual, dan sosial seringkali belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses belajar mengajar.

Dari sisi kebijakan, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk mendukung pendidikan Islam seperti sertifikasi guru madrasah, bantuan operasional sekolah (BOS) madrasah, digitalisasi pesantren, dan revitalisasi kurikulum keislaman—implementasinya di lapangan masih belum merata. Masalah klasik seperti kekurangan guru berkualitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta disparitas mutu antarwilayah menjadi penghambat utama.

Selain itu, dalam konteks globalisasi dan arus sekularisasi yang semakin kuat, pendidikan Islam dituntut untuk tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga mampu melahirkan lulusan yang kompeten di berbagai bidang kehidupan modern. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang bersifat transformatif, inovatif, dan berbasis pada kebutuhan riil umat Islam di era digital dan masyarakat 5.0.

Dengan kompleksitas persoalan tersebut, kajian tentang implementasi strategi dan kebijakan pendidikan Islam menjadi sangat relevan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi dan kebijakan tersebut telah berjalan efektif, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki dan memperkuat pendidikan Islam sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi muslim yang berkarakter, cerdas, dan mampu bersaing secara global.

Melalui makalah ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi aktual pendidikan Islam di Indonesia, strategi implementasinya, kebijakan yang mendasarinya, serta tantangan dan solusi ke depan. Harapannya, makalah ini dapat menjadi kontribusi dalam upaya kolektif meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Islam di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman yang terus berubah.

METODE

Penelitian ini adalah studi normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber data utama dari data kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Strategi dan Kebijakan Pendidikan Islam

1. Pengertian Strategi

Strategi pembelajaran terdiri dari perencanaan tindakan (kumpulan aktivitas), yang mencakup penerapan teknik dan menggunakan berbagai kekuatan selama proses belajar.³

Strategi adalah garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.⁴

Strategi dasar setiap usaha meliputi empat masalah, yaitu: Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi serta kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan.⁵

2. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam adalah upaya pemberdayaan peserta didik melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan pendidikan adalah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan.⁶

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan merupakan ilmu praksis, maka kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya. Sehingga kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Kebijakan pendidikan lahir dari

³ Hamid, A. (2020). Metode dan Strategi Pendidikan Islam.

⁴ Abu Ahmadi. (2020). Strategi Pengembangan Pendidikan Islam. ResearchGate

⁵ Newman, W. L., & Logan, J. (2020). Strategi Pengembangan Pendidikan Islam.

⁶ Aminuddin Bakry. (2010). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. 123dok

ilmu praksis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.⁷

Strategi pendidikan Islam adalah rencana menyeluruh dan terpadu dalam proses mendidik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal, yakni membentuk insan kamil. Sedangkan kebijakan pendidikan Islam adalah peraturan, keputusan, atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan Islam.

Strategi pendidikan Islam merujuk pada pendekatan atau rencana umum yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi adalah metode umum yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar siswa mereka dalam menggapai sasaran yang sudah disepakati.⁸

Tujuan utama pendidikan Islam adalah mencetak manusia beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia, sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 129 dan QS. Luqman: 13-19. Pendidikan Islam juga bertujuan membentuk pribadi yang seimbang antara dunia dan akhirat.⁹

Strategi Implementasi Pendidikan Islam

Integrasi Kurikulum: Menggabungkan ilmu agama dan umum secara harmonis, sebagaimana konsep "integrated curriculum". Peningkatan Mutu SDM: Melalui pelatihan guru, sertifikasi, dan penguatan kompetensi keislaman dan pedagogik. Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam: Seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam terpadu. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan media digital dan e-learning untuk mendukung proses belajar mengajar. Selain itu terdapat beberapa strategi Implementasi Pendidikan Islam, yaitu :

1. Strategi Kontekstual (Contextual Teaching and Learning - CTL)

Tujuan dari strategi ini adalah menjadikan pelajaran agama lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Menghubungkan ajaran agama Islam yang diajarkan di kelas (seperti akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah Islam) dengan realitas dan pengalaman hidup siswa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh : pelajaran tentang solat yang akan mereka lakukan sehari hari, puasa, zakat, dan bertoleransi antar sesama.¹⁰

2. Strategi Pembelajaran Berbasis Nilai (Value-Based Education)

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai Islam (akhlak, tauhid, ibadah) dalam sikap dan perilaku siswa. Sebagai contoh kita bisa menyisipkan nilai dalam semua mata pelajaran. Selanjutnya menjadikan guru sebagai suri tauladan sehingga bisa dicontoh oleh para siswa.¹¹

3. Strategi Integratif-Interkonektif

Tujuan dari strategi ini adalah Menghindari dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Maksudnya adalah menghapus pemisahan atau perbedaan tajam antara ilmu agama (seperti fiqh, tauhid, tafsir) dan ilmu umum (seperti matematika, sains, geografi), sehingga keduanya dipelajari dan dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam pandangan Islam. Menunjukkan bahwa semua ilmu bersumber dari Allah dan Ilmu umum bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (misal: belajar fisika menunjukkan kehebatan ciptaan Allah).¹²

4. Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning)

Tujuan dari strategi ini adalah mendorong partisipasi siswa secara aktif dan kritis. Sebagai contoh siswa bisa diskusi kelompok, role play, studi kasus. Dalam sebuah kelompok tentunya mereka akan saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Mereka akan dituntut aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dengan cara berdiskusi terlebih dahulu. Selain itu mereka bisa melakukan proyek keagamaan (misal: praktik zakat, kegiatan sosial Islami).¹³

5. Strategi Teknologi Digital (Digital Islamic Learning)

Tujuan dari strategi ini adalah menyesuaikan pembelajaran PAI dengan era digital. Sebagai contoh menggunakan e-learning, aplikasi Al-Qur'an digital, media audiovisual Islami.¹⁴

6. Strategi Kultural dan Sosial

Tujuan dari strategi ini adalah Menanamkan nilai Islam melalui lingkungan dan budaya sekolah. Sebagai contoh guru bisa membentuk budaya Islami di sekolah (salat berjamaah, salam, zikir, dll.).¹⁵

⁷ Dr. Suhardi, S.Pd.I, MA. (2010). Kebijakan Pendidikan Islam.

⁸ Qowim, M. (2020). Metode dan Strategi Pendidikan Islam. ResearchGate

⁹ QS. Al-Baqarah: 129 dan QS. Luqman: 13-19

¹⁰ Nurhadi. (2004). Pendidikan Kontekstual. Jakarta: Depdiknas.

¹¹ Zainuddin. (2008). Pendidikan Nilai dalam Perspektif Islam. Jakarta: RajaGrafindo.

¹² Amin Abdullah. (2006). Islam dan Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: LKiS.

¹³ Silberman, M. (2006). Active Learning: 101 Strategies. San Francisco: Pfeiffer.

¹⁴ Ahmad Aziz Mubaroq et al. (2024). "Strategi Inovatif Dalam Mengintegrasikan Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Agama Islam". *Advances in Education Journal*.

¹⁵ Tilaar, H.A.R. (1999). Multikulturalisme dan Pendidikan Islam. Jakarta: Grasindo.

Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Islam

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Mengakui pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang kurikulum madrasah dan pendidikan pesantren. Program Madrasah Reform dan Digitalisasi Pesantren: Untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan Islam.

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam merupakan upaya strategis dan terarah yang bertujuan untuk mengembangkan, mengatur, serta meningkatkan mutu pendidikan Islam agar selaras dengan visi nasional dan kebutuhan masyarakat modern. Kebijakan ini mencakup regulasi, pendanaan, kurikulum, serta pembinaan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren.

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam berfokus pada pengintegrasian nilai-nilai Islam dengan standar pendidikan nasional untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia sekaligus kompeten secara akademis. Pemerintah mengimplementasikan regulasi melalui Kementerian Agama yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan agar tidak terisolasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁶

Sementara itu, kebijakan pendidikan Islam harus responsif terhadap perubahan sosial dan digitalisasi. Mereka menyebutkan pentingnya digital literacy dalam kurikulum pendidikan Islam agar para siswa tidak hanya paham agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat.¹⁷

Di sisi lain, kebijakan pemerintah harus mendukung pemberdayaan lembaga pendidikan Islam agar mampu mandiri secara finansial dan inovatif dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini dilakukan melalui pemberian bantuan dana, pelatihan guru, serta kemudahan akses teknologi.¹⁸

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam kini lebih menekankan pada keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, keterbukaan terhadap teknologi, serta pemberdayaan institusi pendidikan Islam agar berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa.

Tantangan dalam Implementasi

1. Keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan.

Keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan merupakan tantangan fundamental yang masih dihadapi oleh banyak institusi pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Hal ini berdampak langsung pada mutu layanan pendidikan, kualitas pembelajaran, dan kesenjangan pendidikan antardaerah.

Keterbatasan anggaran pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas sarana dan prasarana, minimnya pelatihan guru, dan kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, serta perangkat teknologi informasi. Hal ini secara signifikan menurunkan daya saing lulusan, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan.¹⁹

Sementara itu, distribusi anggaran pendidikan di Indonesia belum merata. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat, yang sering kali tidak cukup untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Mereka menekankan pentingnya alokasi berbasis kebutuhan (needs-based allocation) sebagai pendekatan kebijakan anggaran.²⁰ Keterbatasan anggaran terjadi karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan sarana pendidikan. Ia mencatat bahwa banyak sekolah, terutama madrasah swasta, tidak memiliki akses memadai terhadap teknologi pembelajaran, sehingga kesenjangan digital semakin melebar pascapandemi.²¹

Secara keseluruhan, para ahli menekankan bahwa keterbatasan anggaran dan sarana bukan hanya soal nominal, tetapi juga soal efisiensi pengelolaan dan pemerataan distribusi. Oleh karena itu, reformasi kebijakan anggaran dan penguatan tata kelola pendidikan menjadi sangat penting untuk mengatasi persoalan ini.

2. Kualitas tenaga pendidik yang masih bervariasi.

Kualitas tenaga pendidik merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih sangat bervariasi, baik dari aspek kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian.

¹⁶ Hadiyanto, A. (2021). *Kebijakan Pendidikan Islam di Era Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁷ Rahman, M., & Suryani, D. (2023). "Integrasi Digital Literacy dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 120-134.

¹⁸ Nurbaiti, S. (2022). *Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Islam: Pendekatan Kebijakan dan Implementasi*. Yogyakarta: LKiS.

¹⁹ Supriyadi, E. (2022). *Problematisasi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

²⁰ Zulkarnaen, A., & Lestari, M. (2023). "Analisis Pemerataan Anggaran dan Sarana Pendidikan di Daerah Tertinggal." *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 8(1), 45-60.

²¹ Nurhayati, R. (2021). *Ketimpangan Sarana Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Digital*. Yogyakarta: Deepublish.

Variasi kualitas guru dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang pendidikan, akses pelatihan, dan fasilitas pendukung pembelajaran. Guru-guru di kota besar cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pelatihan dan teknologi, sementara guru di daerah tertinggal seringkali kekurangan dukungan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.²²

Dengan adanya sertifikasi guru belum menjamin kualitas pengajaran yang optimal. Banyak guru yang telah bersertifikat masih menunjukkan keterbatasan dalam hal inovasi metode mengajar, pemanfaatan teknologi, dan penguasaan materi ajar. Ini menunjukkan perlunya evaluasi lanjutan pasca-sertifikasi dan penguatan continuous professional development (CPD).²³

Sementara itu, Kualitas guru sangat bergantung pada sistem rekrutmen dan pembinaan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. Ia menekankan bahwa tanpa sistem rekrutmen berbasis merit dan pelatihan berkelanjutan yang relevan, kualitas guru akan terus menunjukkan kesenjangan.²⁴

Para ahli umumnya sepakat bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik memerlukan pendekatan holistik: dari perbaikan rekrutmen, pelatihan berkelanjutan, penilaian kinerja yang objektif, hingga pemberian insentif yang adil.

3. Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pendidikan, termasuk pendidikan Islam, menjadi hambatan serius dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Ketidaksinkronan kebijakan, perbedaan prioritas, dan lemahnya koordinasi menyebabkan banyak program tidak berjalan efektif di lapangan.

Salah satu penyebab utama kurangnya sinergi adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah pasca desentralisasi pendidikan. Banyak kebijakan nasional yang tidak disertai dengan dukungan anggaran atau pedoman teknis yang jelas, sehingga pelaksanaannya di daerah menjadi tidak optimal.²⁵

Ketidakharmonisan ini juga disebabkan oleh kurangnya forum komunikasi dan evaluasi berkala antara pemerintah pusat (misalnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama) dengan Dinas Pendidikan Daerah. Akibatnya, perencanaan program pendidikan seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan lokal.²⁶

Dalam konteks pendidikan Islam, ketidaksinergian ini tampak dari lemahnya integrasi program antara Kementerian Agama (yang mengelola madrasah dan pesantren) dan Dinas Pendidikan (yang mengelola sekolah umum). Hal ini membuat pendidikan Islam seringkali terpinggirkan dalam prioritas pembangunan daerah.²⁷

Para ahli umumnya menyarankan perlunya pendekatan kolaboratif berbasis data dan kebutuhan lokal, serta penguatan sistem koordinasi antarlembaga agar kebijakan pendidikan bisa lebih selaras dan terimplementasi secara merata di seluruh wilayah.

4. Tantangan ideologis dari arus globalisasi dan sekularisasi.

Globalisasi dan sekularisasi membawa dampak besar terhadap sistem nilai dan ideologi, termasuk dalam ranah pendidikan Islam. Arus global yang membawa nilai-nilai liberalisme, individualisme, dan sekularisme sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keimanan, akhlak, dan ketundukan kepada syariat.

Tantangan ideologis utama dari globalisasi adalah penetrasi nilai-nilai budaya Barat yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia menyebutkan bahwa globalisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menggeser pola pikir dan gaya hidup generasi muda muslim, sehingga memunculkan kecenderungan terhadap sekularisasi pendidikan.²⁸

Sekularisasi dalam pendidikan cenderung memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama, yang berdampak pada pelemahan peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Mereka menggarisbawahi pentingnya pendekatan integratif dalam kurikulum, agar nilai-nilai Islam tetap relevan

²² Rohmat, A. (2022). Variasi Kualitas Guru dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Siswa. Jakarta: Rajawali Pers.

²³ Sutarto, D., & Mulyani, S. (2023). "Efektivitas Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Mengajar: Studi di Sekolah Negeri dan Swasta." *Jurnal Mutu Pendidikan*, 10(1), 23–38.

²⁴ Fitriani, H. (2021). Tantangan Peningkatan Kualitas Guru di Era Digital. Yogyakarta: Deepublish.

²⁵ Basri, H., & Yuliani, R. (2022). Desentralisasi Pendidikan dan Tantangan Sinergi Pusat-Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media.

²⁶ Ismail, M. (2023). "Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 34–49.

²⁷ Nurazizah, S. (2021). Pendidikan Islam dan Desentralisasi: Membangun Sinergi antara Kemenag dan Pemda. Yogyakarta: Deepublish.

²⁸ Hasyim, M. (2022). Globalisasi dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Modern. Jakarta: Kencana.

di tengah derasny arus informasi global.²⁹ Tantangan ideologis ini juga berdampak pada lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah dan pesantren, yang mulai kehilangan kepercayaan publik jika tidak mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas. Maka diperlukan reformasi pendidikan Islam yang mampu mengadaptasi teknologi dan ilmu modern tanpa mengorbankan prinsip ideologis Islam.³⁰

Para ahli umumnya menyarankan pentingnya pendidikan Islam yang bersifat wasathiyah (moderat), terbuka terhadap kemajuan, namun tetap menjaga nilai-nilai spiritual dan moralitas Islam sebagai dasar dalam membangun peradaban yang berimbang. Solusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain dengan peningkatan dana BOS khusus madrasah dan pesantren, pelatihan dan sertifikasi guru secara berkala, sinergi antara Kementerian Agama dan Kemendikbudristek, Membangun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

SIMPULAN

Implementasi strategi dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan usaha strategis dalam menciptakan generasi muslim yang berkualitas. Dibutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang holistik dan integral. Pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di era modern, mulai dari keterbatasan anggaran, variasi kualitas tenaga pendidik, hingga tantangan ideologis akibat globalisasi dan sekularisasi. Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, memainkan peran penting dalam merumuskan arah dan strategi pengembangan pendidikan Islam agar tetap relevan, adaptif, dan berkualitas.

Beberapa fokus yang bisa di ambil dari makalah ini adalah:

1. Strategi pendidikan Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kebijakan pemerintah perlu didesain secara komprehensif dan sinkron antara pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat pelaksanaan program pendidikan.
3. Kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem rekrutmen berbasis kompetensi.
4. Tantangan globalisasi dan sekularisasi harus direspon dengan pendekatan pendidikan Islam yang moderat (wasathiyah), inklusif, dan kontekstual.

SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan sinergi antara Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan pemerintah daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan Islam.
2. Lembaga pendidikan Islam diharapkan terus berinovasi dalam metode pembelajaran dan integrasi kurikulum agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri keislaman.
3. Tenaga pendidik perlu didorong untuk mengikuti pelatihan profesional yang relevan serta diberi insentif yang layak guna menjaga motivasi dan kualitas pengajaran.
4. Masyarakat dan orang tua diharapkan turut aktif dalam mendukung pendidikan Islam, baik melalui pengawasan sosial maupun kontribusi sumber daya.
5. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan Islam secara berkala agar dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan zaman.

REFERENSI

- Abu Ahmadi. (2020). *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam*. ResearchGate
- Ahmad Aziz Mubaroq et al. (2024). "Strategi Inovatif Dalam Mengintegrasikan Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Agama Islam". *Advances in Education Journal*.
- Amin Abdullah. (2006). *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Aminuddin Bakry. (2010). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. 123dok
- Azra, Azyumardi. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Basri, H., & Yuliani, R. (2022). *Desentralisasi Pendidikan dan Tantangan Sinergi Pusat-Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Departemen Agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Dr. Suhardi, S.Pd.I, MA. (2010). *Kebijakan Pendidikan Islam*.

²⁹ Syahrul, A., & Karim, M. (2023). "Sekularisasi Pendidikan: Ancaman dan Strategi Respon Pendidikan Islam." *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan*, 14(1), 55–70.

³⁰ Fitriana, D. (2021). *Membumikan Nilai Islam di Tengah Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Fitriana, D. (2021). *Membumikan Nilai Islam di Tengah Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fitriani, H. (2021). *Tantangan Peningkatan Kualitas Guru di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadiyanto, A. (2021). *Kebijakan Pendidikan Islam di Era Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamid, A. (2020). *Metode dan Strategi Pendidikan Islam*.
- Hasyim, M. (2022). *Globalisasi dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, M. (2023). "Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 34–49.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Newman, W. L., & Logan, J. (2020). *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam*.
- Nurazizah, S. (2021). *Pendidikan Islam dan Desentralisasi: Membangun Sinergi antara Kemenag dan Pemda*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurbaiti, S. (2022). *Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Islam: Pendekatan Kebijakan dan Implementasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurhadi. (2004). *Pendidikan Kontekstual*. Jakarta: Depdiknas.
- Nurhayati, R. (2021). *Ketimpangan Sarana Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Qowim, M. (2020). *Metode dan Strategi Pendidikan Islam*. ResearchGate
- Rahman, M., & Suryani, D. (2023). "Integrasi Digital Literacy dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 120-134.
- Rohmat, A. (2022). *Variasi Kualitas Guru dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Siswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silberman, M. (2006). *Active Learning: 101 Strategies*. San Francisco: Pfeiffer.
- Shamsudin, Datuk Sheikh. (2023). "Integrasi Nilai Agama dalam Pendidikan."
- Supriyadi, E. (2022). *Problematika Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutarto, D., & Mulyani, S. (2023). "Efektivitas Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Mengajar: Studi di Sekolah Negeri dan Swasta." *Jurnal Mutu Pendidikan*, 10(1), 23–38.
- Syahrul, A., & Karim, M. (2023). "Sekularisasi Pendidikan: Ancaman dan Strategi Respon Pendidikan Islam." *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan*, 14(1), 55–70.
- Tilaar, H.A.R. (1999). *Multikulturalisme dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zainuddin. (2008). *Pendidikan Nilai dalam Perspektif Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Zuhdi, M. (2022). "Integrasi Sains dan Agama dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Sebuah Keniscayaan di Era Global." *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 27(2), 101–118.
- Zuhairini, et al. (1991). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulkarnaen, A., & Lestari, M. (2023). "Analisis Pemerataan Anggaran dan Sarana Pendidikan di Daerah Tertinggal." *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 8(1), 45-60.